



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR 132 /KPN.W29-U4/SK.OT.1.6/IV/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa agar dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang dapat dinilai dengan baik dan benar, maka perlu di bentuk Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden...

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- KEDUA** : Pelaksanaan Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pengadilan Negeri Tangerang dilaksanakan setiap Triwulan.
- KETIGA** : Melaporkan hasil Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 4160/KPN.W29.U4/SK.OT.1.6/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pengadilan Negeri Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 April 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP *mu*

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor : 132 /KPN.W29.U4/SK.OT.1.6/IV/2026
Tanggal : 28 April 2026

**TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2.	Budiansyah, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pengawas (<i>Supervisor</i>)
3.	Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.	Hakim	Pengawas 1
4.	Iwan Wardhana, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas 2
5.	Ahmad Husaini, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas 3
6.	Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.	Panitera	Ketua
7.	Dessy Herliani, S.Sos.	Kepala Bagian Umum	Wakil Ketua
8.	Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris 1
9.	Rachmat Budiyanto	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota
10.	Henny Fitria, S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
11.	Dewi Martiani Wulansari, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
12.	Maya Kartika Laksmiwati, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
13.	Marbunga Ropita Simanullang, A.Md.Ak.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP 